



LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2464/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 12 Nopember 2024

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja
Jalan Seririt - Singaraja, Pamaron, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengganggu Ketertiban Umum (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Warga Negara Asing Yang Melakukan Perilaku Mengganggu Ketertiban Umum di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Prya Pradnyandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101068
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

2. SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN OLEH KANTOR IMIGRASI
KELAS II TPI SINGARAJA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH BALI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA
JL. Seririt Singaraja, Pemaron Buleleng Bali Telp: 0362-32174 Fak : 0362-31175
www.imigrasisingaraja.kemerkumham.go.id e-mail: kanim_singaraja@imigrasi.go.id

LEMBAR DISPOSISI		
Surat Dari :	Diterima Tanggal : <u>18-11-2014</u>	No. Agenda :
Nomor Surat :	Sifat	
Tanggal Surat :	<input checked="" type="checkbox"/> Sangat Segera	<input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal :		
Dengan Hormat Harap		
<input type="checkbox"/> Kasubag TU	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran	<input type="checkbox"/> Konsultasi Hasil
<input type="checkbox"/> Kasi Tikkim	<input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut	<input type="checkbox"/> Diikuti/Dilaporkan
<input type="checkbox"/> Kasi Lalintalkim	<input type="checkbox"/> Koordinasi dan konfirmasi	<input type="checkbox"/> Dihubungi
<input checked="" type="checkbox"/> Kasi Inteldakim	<input type="checkbox"/> Mewakili	<input type="checkbox"/> Catat dan Ingatkan
	<input type="checkbox"/> Dilaksanakan/diselesaikan	<input type="checkbox"/> File
	<input checked="" type="checkbox"/> Disiapkan Bahan	
Catatan : <i>Dibantu proses pencarian data yang danya sudah data sudah. lya ef</i>		

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Catatan:



LAMPIRAN 03

PEDOMAN WAWANCARA

DRAFT WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum bagi Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?
2. Bagaimana kendala dan upaya keimigrasian dalam mencegah WNA mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?

B. Pertanyaan Kepada Kasi Inteldakim

1. Bagaimana bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?
2. Bagaimana bentuk mengganggu ketertiban umum yang dimaksudkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian?
3. Bagaimana bentuk pemberian sanksi pidana kepada Warga Negara Asing yang mengganggu ketertiban umum?
4. Bagaimana upaya yang dilangsungkan untuk memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum?

C. Pertanyaan Kepada Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

1. Bagaimana bentuk penindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja?
2. Apa kendala yang dihadapi selama proses penindakan warga negara asing yang mengganggu ketertiban umum?



LAMPIRAN 04

DAFTAR NARASUMBER

DAFTAR NAMA NARASUMBER

1. Nama : Hergia Luqman Wicaksono
Jabatan : Fungsional Tertentu Analisis Keimigrasian Pertama
2. Nama : Hendriko Demus Septiano
Jabatan : Anggota Seksi Penindakan Keimigrasian





LAMPIRAN 05

DOKUMENTASI PENELITIAN



**FOTO WAWANCARA DENGAN BAPAK HERGIA LUQMAN
WICAKSONO**



FOTO WAWANCARA DENGAN BAPAK HENDRIKO DEMUS SEPTIANO

RIWAYAT HIDUP



Kadek Prya Pradnyandari, lahir di Singaraja pada tanggal 12 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Nengah Pastika dan Nyoman Sukrining. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Gang Kukur, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Fajar Harapan dan lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SD Fajar Harapan dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kuta Utara dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Kuta Utara dan melanjutkan ke Srata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada akhir semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Mengganggu Ketertiban Umum (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja)”. Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Srata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

